

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARIMAU
SUMATERA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA**

OLEH:

ANDINA SALSABILA

UNIVERSITAS ANDALAS

1910113072

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing:

Magdariza, S.H., M.H.
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARIMAU SUMATERA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

(Andina Salsabila, 1910113072, 63 halaman, Hukum Internasional, Fakultas Hukum
Universitas Andalas)

ABSTRAK

Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan satu satunya dari tiga subspecies harimau yang masih ada di Indonesia yang menghadapi ancaman serius akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Meskipun berbagai upaya perlindungan, termasuk kebijakan nasional dan peraturan internasional seperti IUCN Red List dan CBD untuk melindungi satwa langka, tantangan dalam penegakan hukum dan konflik antara manusia dan satwa tetap menjadi hambatan utama dalam upaya konservasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harimau sumatera menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? 2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap Harimau Sumatera diatur melalui hukum internasional dan nasional, dimulai dengan Deklarasi Stockholm dan Rio, didukung oleh IUCN dan CBD yang mengklasifikasikan harimau Sumatera sebagai Critically Endangered. Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 untuk mengatur perlindungan spesies dan penegakan hukum terkait. 2. Perlindungan terhadap Harimau Sumatera di BKSDA Sumatera Barat masih belum efektif, dengan angka kematian harimau yang tinggi. Penegakan hukum yang kurang, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap harimau sumatera.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Harimau Sumatera, Hukum Internasional, Hukum Nasional

**THE LEGAL PROTECTION OF SUMATRAN TIGERS UNDER
INTERNATIONAL AND INDONESIAN NATIONAL LAW**
(Andina Salsabila, 1910113072, 63 pages, International Law, Faculty of Law,
Andalas University)

ABSTRACT

*The Sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*) is the only one of the three tiger subspecies still existing in Indonesia that faces serious threats due to poaching, illegal trade and habitat destruction. Despite various protection efforts, including national policies and international regulations such as the IUCN Red List and CBD to protect endangered animals, challenges in law enforcement and conflicts between humans and animals remain major obstacles to conservation efforts. Based on the background above, the problem formulation is: 1. What is the legal protection for Sumatran tigers according to international law and Indonesian national law? 2. How effective is the legal protection of Sumatran tigers in the West Sumatra Natural Resources Conservation Center area? The method used in this research is a normative and empirical legal approach. The research results conclude: 1. Legal protection for the Sumatran Tiger is regulated through international and national law, starting with the Stockholm and Rio Declarations, supported by the IUCN and CBD which classify the Sumatran tiger as Critically Endangered. Indonesia has implemented various laws and regulations, including Law no. 5 of 1990 and PP no. 7 of 1999, as well as Minister of Environment and Forestry Regulation No. 20 of 2018 to regulate species protection and related law enforcement. 2. Protection of Sumatran Tigers in the West Sumatra BKSDA is still not effective, with a high tiger death rate. Insufficient law enforcement, limited resources and low public awareness are the main obstacles. Cooperation between the government, non-governmental organizations and the community is needed to increase the effectiveness of protection for Sumatran tigers.*

Keywords: Protection, Law, Sumatran Tiger, International Law, National Law

